

'Amukti Palapa' Perungg

Pasca putusan WTO (*World Trade Organization*) yang memenangkan gugatan Brazil atas hambatan yang mereka alami untuk mengekspor karkas *broiler* (ayam pedaging) ke Indonesia, keresahan *stakeholder* perunggasan *broiler*—termasuk pemangku kebijakan—tak begitu nampak hiruk. Meskipun faktanya perunggasan *broiler* nasional menghadapi 2 pilihan menantang, yaitu pilih *mukti* (berjaya) atau mati (terbunuh).

Sebelum membedah masalah dan menyusun strategi, persoalan ini sejatinya adalah hidup matinya suatu bangsa karena terkait pangan. Jargon kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan tersandung batu besar yang tidak hanya butuh diratapi akan tetapi harus disiasati agar kita mampu melewatinya.

Lebih dari sepuluh tahun ini penulis menyuarakan jihad kedaulatan pangan dalam makna negara dan bangsa ini harus bersungguh-sungguh dan sangat serius mengurus persoalan pangan (termasuk pangan hasil ternak). Upaya mencapai kedaulatan pangan, diterjemahkan melalui pendekatan Panca Krida Kedaulatan Pangan Nusantara (PKKPN).

Kedaulatan pangan adalah cita-cita mulia sebagai sebuah janji suci dalam berbangsa yang secara akal sehat pantang untuk dilanggar. Berdaulat pangan adalah salah satu ukuran dan komponen tak terpisahkan dari kedaulatan negara.

Adapun Panca Krida Kedaulatan Pangan Nusantara meliputi krida yang pertama adalah komitmen politik yang kuat untuk melindungi bangsa dan negara dalam membangun kedaulatan pangan melalui sinergi kebijakan pangan. Mencukupi kebutuhan pangan yang cukup kuantitas dan kualitasnya, tersebar secara merata dengan harga terjangkau ke seluruh pelosok tanah air Indonesia adalah merupakan komitmen yang tidak boleh di tawar baik dari level Presiden hingga kepala dusun di kampung-kampung.

Krida kedua adalah optimalisasi pemanfaatan lahan dan air untuk produksi pangan. Ketiga, pemandirian proses produksi pangan termasuk bibit, pupuk, pakan dan infrastruktur pendukung produksi pangan. Pada poin inilah terdapat aspek pembelaan kepada petani, peternak, dan produsen pangan dalam negeri. Keempat, pembudayaan pola pangan nusantara. Kelima, penguatan kelembagaan dan jaringan pangan nusantara.

Pemikiran Panca Krida Kedaulatan Pangan Nusantara ini bukan saja digunakan dalam pagar negara sebagai landasan pembangunan kedaulatan pangan. Namun juga dikomunikasikan ke luar batas negara, dijadikan sebagai pijakan diplomasi dan diperjuangkan sebagai suatu nilai yang setara dengan maksud dan tujuan konstitusi sebuah negara berdaulat yang harus juga dihormati oleh

dunia internasional. Terlebih jika kemudian menyangkut sesuatu komoditas yang telah bisa dicukupi dari dalam negeri sendiri (termasuk daging *broiler*).

Menyusun dan Memetakan

Pepatah kuno bilang, jangan pernah bertempur di medan yang dipersiapkan lawan. Lawan, dalam arti negara-negara pengeksport daging ayam, mengandalkan sistem *cold chain*. Jika semua pasar dalam negeri Indonesia mengadopsi sistem *cold chain*, akan lebih mudah bagi mereka untuk penetrasi. Karena telah tersedia fasilitas *cold chain* sejak keluar pelabuhan hingga pasar retail. Konsumen pun telah memiliki preferensi yang sama dengan produk karkas beku yang mereka tawarkan.

Maka kebalikannya, budaya *hot chain*, barangkali bisa dirumuskan dan ditata ulang, menjadi kearifan lokal yang merupakan keunggulan perunggasan nasional. *Hot chain*, atau distribusi *broiler* dalam keadaan hidup dan dijual kepada konsumen dalam kondisi segar.



Karkas hangat, lepas dari pemotongan. Sistem distribusi *hot chain* bisa menjadi *barrier* pasar dalam negeri berbasis budaya lokal yang lebih sulit ditembus oleh produk karkas beku impor.

Hal ini bisa menjadi alternatif lain bahkan lawan dari kredo yang selama ini didengungkan yaitu "think globally—act locally", harus dibalik menjadi "think locally—act globally". Mengeplorasi berbagai potensi kearifan lokal untuk bertahan bahkan memukul balik serangan global. Jadi ungkapan ini merupakan kebalikan dari jargon lawas "think globally—act locally" yang sama saja artinya meniru strategi perang yang sudah dikuasai oleh lawan. Strategi ini sebenarnya mencerminkan krida ke-4 panca krida kedaulatan pangan di atas, yaitu mengeksplorasi kearifan budaya lokal dalam hal penganeragaman pangan dan pola konsumsi pangan sesuai dengan adat kebiasaan lokal dan potensi alam pendukungnya.



asan Broiler Nasional



Prof Ali Agus*

Tetap Berusaha

Sejak lama peternak dan pabrik pakan memendam rasa, jika salah satu faktor tingginya biaya produksi pakan dan biaya pokok produksi *broiler* adalah tingginya harga jagung sebagai komponen terbesar dalam pakan. Selama ini harga jagung bisa turun jika kran impor dibuka, namun hal itu musykil karena alasan keberpihakan pemerintah pada petani jagung. Kondisi kali ini, barangkali perlu penanganan yang berbeda, karena bagaimanapun faktanya perunggasan nasional perlu pasokan pakan lebih murah untuk melawan gempuran global, yang mau tak mau harus ada suplai jagung murah untuk menurunkan biaya produksi.

Untuk itu, petani jagung yang merasa terdampak dari kebijakan jagung murah ini bisa dibimbing untuk memproduksi komoditas lain semisal kedelai, yang selama ini juga masih tergantung pada impor. Selain itu, pemerintah harus memangkas semua bea, tarif dan atau pajak atas impor bahan baku pakan, agar produksi daging *broiler* dalam negeri menjadi lebih kompetitif jika dibandingkan dengan karkas beku dari Brazil.

Pelaku usaha perunggasan pun semuanya harus menyadari dan berusaha untuk memangkas biaya produksi demi efisiensi baik yang terkait pakan, bibit, budidaya dan sarana prasarana pendukungnya. Kesadaran bahwa perunggasan harus hidup bersama-sama wajib ditumbuhkan, jangan ada lagi segmen mata rantai industri yang kemudian menuai tudingan menggantung untung lebih. Efisiensi di segmen pembesaran/produksi *livebird* (ayam hidup) digenjut dengan aplikasi teknologi dan sistem budidaya di dalam *closed house* (kandang tertutup). Mau tak mau, pemerintah harus memberikan dukungan untuk transformasi teknologi budidaya ini, dengan misalnya memberikan bantuan kredit lunak jangka panjang. Lebih bagus lagi, disediakan kredit skema budidaya *broiler closed house* ini.

Diplomasi Kuat

Di level global, diperlukan diplomasi G to G yang kuat dan bermartabat untuk menindaklanjuti putusan WTO. Salah satunya untuk menegakkan azas saling menghormati kedaulatan pangan Indonesia dan hak negara Indonesia dalam melindungi rakyatnya, termasuk untuk melaksanakan panca krida kedaulatan pangan nusantara.

Target diplomasi pertama yang bisa dirintis adalah dengan memberikan opsi pengalihan ekspor atau re-ekspor produk impor tersebut ke negara lain yang memiliki kedekatan hubungan diplomatik. Atau menemukan substitusi komoditas impor karkas ayam kepada komoditas lain dengan nilai yang setara. Misalnya dialihkan untuk jagung dan bahan pakan murah lainnya.

Jika tiada alternatif lain, terpaksa memang betul-betul harus menerima karkas ayam Brazil, maka karkas itu menjadi bagian dari komponen baku produksi pangan olahan *ready to eat* yang diproduksi khusus untuk ekspor. Tentu setelah diproses menjadi olahan yang kompetitif di dunia internasional, dengan olahan cita rasa nusantara yang mampu diterima lidah masyarakat global. Sebagaimana mie instan produksi Indonesia yang kini telah mendunia. Bahkan,

olahan daging ayam ini, kalau perlu ekspor kembali negara asalnya Brazil, dan melalui diplomasi cerdas sehingga diterima pula produk olahan pangan tersebut.

Hak untuk Tidak Membeli

Di berbagai belahan dunia manapun, semangat nasionalisme selalu ditunjukkan melalui berbagai cara dan ekspresinya oleh warga bangsa dan pemerintahnya. Oleh karena itu, menghadapi karkas *broiler* impornipun diperlukan spirit nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, untuk keberpihakan kepada perunggasan negeri sendiri.

Rakyat Indonesia dari segala lapisan dan jenis industri, memiliki hak untuk tidak membeli dan tidak mengonsumsi produk yang membahayakan kelangsungan hidup industri dalam negeri. Pertahanan di tingkat negara, kini berada di tangan warganya sendiri. Hak ini, bukan hanya dituangkan dalam teriakan tuntutan atau diskusi bahkan demonstrasi, namun perlu realisasi dan komitmen. Perlu pertemuan yang sifatnya konfidensial, melibatkan pelaku utama perunggasan, importir, distribusi, ekspedisi, dan asosiasi retail. Untuk itu, jika memungkinkan kami dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (Fapet UGM) siap menjadi tuan rumah untuk mempertemukan para pelaku utama industri unggas *broiler* (terutama di sektor hulu) secara tertutup dan *highly confidential* (sangat rahasia).

Pijakan dari rencana itu adalah, perlu komunikasi, konsolidasi dan aksi dari pihak yang sebenarnya paling berkepentingan terhadap mukti atau matinya perunggasan. Tak lain adalah pelaku usaha perunggasan berikut industri pendukungnya, seperti industri pakan, obat hewan dan sarana produksi lainnya. Sedangkan industri hilir (pabrik pengolahan, kuliner), bisa dikatakan tidak akan banyak terpengaruh, karena darimanapun bahan baku (karkas, daging ayam) yang mereka dapatkan akan tetap berproduksi.

Semua harus ditata dalam strategi yang rapi, dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan konsisten dengan pendekatan yang komprehensif. Termasuk pula antisipasi jika ada penumpang "gelap" yang diam-diam mengambil kesempatan. Karena, bagaimanapun, perunggasan dalam negeri harus diselamatkan. Jangan sampai nanti timbul gejolak dari mereka yang terhempas. Langkah kaki orang "lapar" seringkali lebih katastrofik dibandingkan deru dan bisingnya derap kaki ribuan tentara.

Terlepas dari semua pembahasan tersebut, apapun yang sebenarnya sedang terjadi *minute to minute*, prakiraan 'cuaca' perunggasan nasional tetap terbaca akan menghadapi gulita dan badai kiriman. Berkaca pada sejarah, dibutuhkan sosok tangguh bak Mahapatih Gadjah Mada dengan sumpah Amukti Palapa-nya yang cerdas, berani, tegas dan konsisten dan dipercaya publik dalam mengorganisasikan semuanya. Konon adalah pemuda Gadjah Mada yang gagah perwira tetiba bersinar muncul mengurai dan mengatasi megakrisis kerajaan besar Majapahit. Barangkali, apa memang kita ini sedang menunggu keajaiban dari *the power of kepepet*? ●TROBOS

*Dekan Fakultas Peternakan UGM
Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DI Yogyakarta